

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABANAN**

**Sagung Inten Evicahyani¹
Nyoman Djinar Setiawina²**

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia
Email : intensuardika@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan variabel intervening Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui pendekatan analisis *Structural Equation Modeling (SEM) Partial Least Square (PLS)*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Tabanan. Jumlah SKPD sebanyak 40 dengan masing-masing 2 responden pada setiap SKPD sehingga total sampel sebanyak 80 orang. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Pemanfaatan SIPKD berpengaruh positif dan signifikan, terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui variabel intervening, yaitu Penerapan SPIP.

Kata kunci: SDM, SAP, SIPKD, SPIP, LKPD.

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of independent variables (Competence of Human Resources/SDM, Implementation of Government Accounting Standards/SAP, and Utilization of Regional Financial Information System/SIPKD), to quality of Local Government Finance Report/LKPD with intervening variables Implementation of Government Internal Control System/SPIP through SEM analysis approach Partial Least Square (PLS). Type of data uses in this research is primary data. Data used in this research is the primary data. Data collected through questionnaires to Financial Management (User Administration Budget and Finance Officer) on the Work Unit (SKPD) in Tabanan regency government. SKPDs number of 40 with each second respondent in the sector departments so that the total sample of 80 people. Result of Hypothesis testing indicates have an effect positive and significant the competence of Human Resources, Government Accounting Standards Implementation, Utilization of Financial Management Information System and significant positive effect, to the quality of Local Government Finance Report Tabanan either directly or indirectly through intervening variables, namely the adoption of Government Internal Control System.

Keywords: SDM, SAP, SIPKD, SPIP, LKPD.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban yang dilakukan secara kontinyu pada setiap periode tertentu dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan yang mencerminkan berhasil tidaknya pelaksanaan misi organisasi (Mardiasmo, 2006). Akuntabilitas tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam perwujudan perubahan informasi baik untuk akuntansi maupun administrasi publik bagi keterbukaan manajemen pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya publik yang diberikan masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan dan membiayai pembangunan merupakan salah satu pilar utama perekonomian suatu daerah. Informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah melalui publikasi dalam satu periode kepada para pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang terpublikasi itu sangat diperlukan oleh banyak pihak untuk bahan pengambilan keputusan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau yang disingkat dengan LPKD merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran, laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKPD disusun dengan berpedoman pada SAP. LKPD yang berkualitas seperti berikut:

“Harus memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yakni: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami, dengan menerapkan kreterian tersebut dalam laporan keuangan yang disajikan berarti pemerintah daerah dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan daerah. LKPD setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat/TMP, (PP No.24 Tahun 2005)”.

Permasalahan yang terjadi selama enam tahun terakhir dari Tahun 2008-2013 dalam setiap penyajian LKPD yaitu masih terdapatnya beberapa temuan tentang ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan masih lemahnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mana keduanya merupakan kriteria dari penilaian informasi keuangan yang disajikan sehingga dapat mempengaruhi opini dan kualitas LKPD tersebut. Kajian yang menarik perlu dipahami adalah penyajian laporan keuangan yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Namun, sampai saat ini penyajian laporan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah masih belum sesuai harapan. Kenyataan ini telah ditemukan oleh BPK-RI melalui suatu sistem auditnya. Permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan oleh BPK-RI adalah:

“1) Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat, 2)Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, 3) terlambat menyampaikan laporan, 4) Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, dan 5) Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai. (Laporan hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Tabanan Tahun 2013)”.

Laporan yang bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan bagi yang berkepentingan bersumber dari keberadaan data yang tersedia, sistem pengolahan data tersebut, dan mengkomunikasikannya. Dalam menyusun LKPD, pemerintah menyelenggarakan akuntansi pemerintah sebagai bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan merupakan suatu data dan informasi (Halim, 2007). Informasi yang bermakna berasal dari perubahan data dalam suatu konteks tertentu (Lillrank, 2003). Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah, pemerintah menyelenggarakan akuntansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan daerah yang disajikan diharapkan benar-benar harus berkualitas dengan tingkat karakteristik yang memadai. Karakteristik yang dimaksud adalah sesuai PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP seperti berikut ini.

“Laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam bentuk informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP memiliki empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kualitas yang dikehendaki yakni relevan, andal dapat dipahami dan dapat dibandingkan. (PP No. 24 Th 2005)”.

Kualitas laporan keuangan adalah penyajian laporan keuangan yang memiliki kriteria antara lain:

“(a) kesesuaian dengan SAP, (b) Kecukupan Pengungkapan, (c) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, (d) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat yang akan berpengaruh terhadap pemberian opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan. (LHP BPK-RI atas LKPD Tabanan Tahun 2013).”

Kompetensi sumber daya manusia dalam konteks perwujudan laporan keuangan bagi siapa pun termasuk pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam rangka perwujudan integritas keuangan, seperti yang dijelaskan oleh Widodo (2001) yaitu:

“Kompetensi SDM adalah kemampuan SDM untuk melaksanakan

tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. SDM yang berkompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. (Widodo dalam Kharis: 2010)”.

Suatu prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengklasifikasian, dan melakukan ringkasan, bagi suatu transaksi keuangan serta pelaporan keuangan yang dikerjakan secara manual maupun komputerisasi sehubungan dengan pertanggungjawaban APBD adalah suatu cerminan sebuah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang merupakan perwujudan dari Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat atau diciptakan berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 (Halim: 2007). Sementara itu, penerapan sistem akuntansi yang andal dapat mempengaruhi kualitas LKPD (Mardiasmo: 2006). Suatu penjelasan tentang sistem informasi keuangan daerah yang disusun berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 bahwa penyelenggaraan yang sejalan dengan prinsip dan tatakelola pemerintahan yang baik (*good Governance*) dalam hal kemajuan teknologi informasi yang dapat dikembangkan serta dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah demi kepentingan publik yang secara keseluruhan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sistem pengendalian Intern pemerintah merupakan hal yang sangat utama dalam kelangsungan pembangunan semua unsur pengendalian pemerintahan. Undang-undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP telah dipersiapkan seperti berikut:

“SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai yang dilaksanakan secara terus menerus demi memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang andal, pengamanan terhadap aset Negara, dan kepatuhan

terhadap peraturan perundangan-undangan, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. SPIP juga dikatakan sebagai suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (PP No. 60 Tahun 2008)".

Beberapa fenomena yang terjadi membuat penelitian ini penting untuk dilakukan. Berdasarkan atas fenomena tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan?
- 2) Bagaimanakah pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan?
- 3) Bagaimanakah pengaruh pemanfaatan SIPKD terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan?
- 4) Bagaimanakah pengaruh penerapan SPIP terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan?
- 5) Adakah pengaruh kompetensi SDM secara tidak langsung terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP?
- 6) Adakah pengaruh penerapan SAP secara tidak langsung terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP?
- 7) Adakah pengaruh Pemanfaatan SIPKD secara tidak langsung terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP?

Secara teoritis kompetensi SDM, penerapan SAP, pemanfaatan SIPKD dan penerapan SPIP akan berdampak pada kualitas LKPD yang dihasilkan, rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan.
- 2) Penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan.
- 3) Pemanfaatan SIPKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan.
- 4) Penerapan SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan.
- 5) Ada Pengaruh secara tidak langsung kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP.
- 6) Ada Pengaruh secara tidak langsung penerapan SAP terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP.
- 7) Ada pengaruh secara tidak langsung Pemanfaatan SIPKD terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tabanan. Waktu pelaksanaan penelitian dari tahun 2008-2013.

Penentuan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer, sedangkan populasinya yaitu pengelola keuangan pada 40 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Metode pengambilan sampel yang digunakan

dengan *purposive sampling* yang mengambil 2 (dua) orang pengelola keuangan di masing-masing SKPD yang memiliki tanggungjawab dan tugas pokok fungsi dalam penyusunan LKPD. Sampel yang diambil langsung menjadi responden dalam penelitian sehingga jumlah responden menjadi 80 orang.

Definisi Operasional Variabel

1) Kualitas laporan Keuangan pemerintah Daerah

Kualitas LKPD adalah laporan keuangan yang dapat menjelaskan empat karakteristik kualitatif laporan keuangan (andal relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan). Tujuan laporan keuangan melalui penyajian informasi akuntansi diwujudkan melalui ukuran-ukuran normatif karakteristik laporan keuangan tersebut. Kualitas informasi LKPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, yakni : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disajikan secara relevan, andal, dapat dipahami, dapat dibandingkan, serta sesuai dengan pedoman penyusunan LKPD

2) Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi SDM adalah karakteristik dari seseorang yang mempunyai kemampuan, keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas fungsi akuntansi dilihat dari pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, serta keterampilan yang dimiliki (Tjiptoherijanto,2001). Indikator yang digunakan untuk mengukur kompetensi SDM yaitu dengan melihat latar belakang pendidikan, pemahaman

terhadap peraturan dan standar, mampu berinteraksi dengan sistem, pelatihan dan Bimtek, serta pengalaman bekerja.

3) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan LKPD sesuai dengan SAP yang merupakan syarat/pedoman yang memiliki kekuatan hukum (Bastian,2005). Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur penerapan SAP, yaitu akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi.

4) Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pemanfaatan SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan memanfaatkan program informasi teknologi untuk mendukung Sistem Informasi Keuangan Daerah ada. SIPKD dimanfaatkan untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah atau data terkait lainnya menjadi suatu informasi yang berguna bagi masyarakat yang akan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur pemanfaatan SIPKD adalah kemajuan informasi komunikasi, perkembangan web dan teknologi internet, perubahan sistem pelaporan, sarana prasarana yang memadai, pemeliharaan yang teratur.

5) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam hal penerapan suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah dipersiapkan pula suatu pedoman yang bertitik tolak dari PP No. 60 Tahun 2008 yang selengkapnya seperti berikut ini.

”SPIP diterapkan untuk mencapai tujuan organisasi melalui proses integral pada tindakan dan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara terus menerus untuk memberikan keyakinan memadai yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang disajikan secara andal, pengamanan terhadap asset negara serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh SDM dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. (PP No. 60 Tahun 2008)”.

Pengendalian intern juga merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta mempunyai peran yang sangat penting dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya penggelapan (*fraud*). Indikator yang digunakan dalam mengukur penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu Integritas data, Ketepatan posting dan input data, Prosedur otorisasi dokumen transaksi, Tersimpannya dokumen sumber data, Pembagian tanggung jawab.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan alternatif *Partial Least Square* PLS (*component based SEM*), regresi data panel dengan alat uji statistik *Eviews*.

1) Outer Model

Outer Model (*measurement model*) atau yang disebut dengan model pengukuran merupakan korelasi antara indikator dengan variabel latennya. Dalam penelitian ini terdapat lima model pengukuran yang semuanya merupakan indikator reflektif, yaitu: a) Kompetensi SDM, b) Penerapan SAP, c) Pemanfaatan SIPKD, d) Penerapan SPIP, dan e) Kualitas LKPD. Outer model dapat dilihat dari *Convergent Validity (CV)*, *Discriminant Validity (DV)* dan *Composite Reliability (pc)*.

2) Inner model

Dalam PLS *inner model* atau *inner relation* yang menjelaskan hubungan antar variabel tidak terukur berdasarkan substansi teori. Model persamaan dalam penelitian ini adalah.

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon_1$$

$$Y_2 = \beta_4 X_1 + \beta_5 X_2 + \beta_6 X_3 + \beta_7 Y_1 + \varepsilon_2$$

Keterangan :

X_1 = Kompetensi SDM

X_2 = Penerapan SAP

X_3 = Pemanfaatan SIPKD

Y_1 = Penerapan SPIP

Y_2 = Kualitas LKPD

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_7$ = koefisien jalur

$\varepsilon_1, \varepsilon_2$ = inner residual

Evaluasi terhadap *inner model* dilakukan dengan melihat besarnya koefisien jalur strukturalnya, dan juga nilai uji t statistiknya yang diperoleh dengan metode *bootstrapping*. Di samping itu juga diperhatikan R^2 untuk variabel laten dependen. Nilai R^2 sekitar 0,67 dikatakan baik, sebesar 0,33 dikatakan moderat, sedangkan 0,19 dikatakan lemah. Perubahan R^2 dilihat/digunakan

dalam menentukan apakah pengaruh variabel laten tertentu terhadap variabel laten *independen* memiliki pengaruh yang substantif. Selain R^2 model PLS juga dapat dievaluasi kemampuan prediksinya atau *predictive prevalence* melalui Stone-Geiser Q Square test (Ghozali, 2011). Nilai Q^2 yang memiliki nilai diatas nol memberikan makna bahwa model yang dibuat memiliki *predictive prevalence*, sebaliknya nilai Q^2 dibawah nol memberikan makna bahwa model yang dibuat kurang memiliki *predictive prevalence*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, karakteristik Pengelola Keuangan dapat dilihat melalui demografi Pengelola Keuangan. Demografi pengelola keuangan menerangkan secara umum mengenai pengelola keuangan di setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Demografi Pengelola keuangan pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, umur, dan pendidikan.

Jenis kelamin Pengelola Keuangan

Karakteristik Pengelola Keuangan berdasarkan jenis kelamin di Pemerintah Kabupaten Tabanan lebih didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 93,8 persen sedangkan Pengelola Keuangan dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 6,2 persen. Dalam hal ketelitian dan kerapian administrasi perempuan biasanya jauh lebih teliti dan rapi dari laki-laki, sehingga dapat memperkecil kesalahan-kesalahan dalam pencatatan administrasi, namun kenyataannya di Pemerintah Kabupaten

Tabanan dalam penunjukkan pejabat pengelola keuangan masih didominasi oleh pegawai yang berjenis kelamin laki-laki.

Umur Pengelola Keuangan

Karakteristik Pengelola Keuangan berdasarkan umur menunjukkan bahwa Pengelola Keuangan didominasi oleh pengelola keuangan yang berada pada umur 45 Tahun keatas. Umur pengelola keuangan dimasing –masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan 51,2 persen memiliki umur diatas 50 Tahun, 30 persen berada pada rentan umur 45 sampai dengan 49 tahun dan sisanya berada di bawah 45 Tahun.

Pendidikan Pengelola Keuangan

Kualifikasi Pendidikan Pengelola Keuangan SKPD karakteristik Pengelola Keuangan SKPD berdasarkan pendidikan di Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan prosentasenya. Dimana 48,8 persen Pengelola Keuangan SKPD memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4, 47,5 persen berpendidikan S2 dan sisanya dari D3 dan SMA. SDM di Pemerintah Kabupaten Tabanan yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi sebanyak 47 persen namun yang tersebar di dimasing-masing SKPD hanya 18,7 persen yang menjadi satuan pengelola keuangan daerah. Ini berarti bahwa SDM untuk satuan pengelola keuangan daerah di masing-masing SKPD dilihat dari segi latar belakang pendidikan belum optimal.

Uji Validitas Model

1) Uji *Outer Model*

Untuk mengetahui apakah indikator yang digunakan untuk membentuk konstruk atau variabel laten adalah valid, maka dilakukan analisis sebagai berikut.

Hasil *Output PLS (Partial Least Square)* mengenai *convergent validity* dilihat dari *outer loading indikator* dapat diketahui bahwa semua indikator yang membentuk konstruk Kompetensi SDM (X1), Penerapan SAP (X2), Pemanfaatan SIPKD (X3), Penerapan SPIP (Y1) dan Kualitas LKPD (Y2) secara statistik adalah signifikan dengan nilai t hitung lebih besar dari 1,96 dengan p *value* sebesar 0,000. Demikian juga nilai loading semuanya diatas 0,50, yang berarti bahwa konstruk yang dibuat telah memenuhi syarat *convergent validity*.

Hasil *crossloading* indikator terhadap konstruk Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Pemanfaatan SIPKD, Penerapan SPIP dan Kualitas LKPD Kabupaten Tabanan dilihat dari *discriminant validity* sudah terpenuhi dengan melihat *crossloading* sudah terpenuhi dengan baik karena indikatornya memiliki *crossloading* lebih pada konstruknya lainnya. Kelayakan konstruk yang dibuat juga dapat dilihat dari *discriminant validity (DV)* melalui *Average Variance Extracted (AVE)*, *composite reliability (pc)* umumnya digunakan untuk indikator reflektif yang bertujuan untuk mengukur konsistensi internal suatu konstruk, dan *Cronbach Alpha*. Konstruk Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Pemanfaatan SIPKD, penerapan SPIP dan Kualitas LKPD dikatakan sangat bagus, karena memiliki *discriminant validity* yang jauh lebih besar dari 0,50 untuk *Average Variance Extracted (AVE)*, *composite Reliability* dan *cronbach alpa* diatas 0,50.

Metode lain untuk melihat *discriminant validity (DV)* adalah dengan melihat *square root of Average Variance Extracted (AVE)* setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya. Dapat disimpulkan konstruk kompetensi SDM, penerapan SAP, pemanfaatan SIPKD, penerapan SPIP dan

kualitas LKPD juga valid. Hal ini dapat dilihat nilai akar kuadrat dari AVE yang dicetak dengan huruf tebal, memiliki nilai yang lebih besar dari korelasi antar konstruk, yaitu angka-angka yang ada di sebelah kirinya. Hanya variabel kualitas LKPD (Y2) memiliki *diskriminan validity* yang marjinal (kurang baik), karena angka akar AVE 0,839 lebih besar dari korelasi antara X3 dengan Y2, dan Y1 dengan Y2.

2) Uji *Inner Model*

Uji *Inner Model* yang disebut juga pengujian antar konstruk pertama-tama dilakukan dengan melihat pengaruh signifikan antar konstruk yang diuji, dalam PLS *inner model* juga disebut *inner relation* yang menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan substansi teori. Model persamaannya adalah.

$$Y_1 = 0.069 X_1 + 0.089 X_2 + 0.102 X_3$$

$$Y_2 = 0.062 X_1 + 0.046 X_2 + 0.087 X_3 + 0.087 Y_1$$

Validitas model struktural atau *inner model* dapat dilihat dari R^2 dan variabel konstruk dependen dan f^2 . Untuk R^2 dalam penelitian ini terdapat tiga konstruk independen, yaitu Kompetensi SDM (X1), Penerapan SAP (X2), Pemanfaatan SIPKD (X3). Dilihat dari nilai R^2 untuk Y1 sebesar 0.791 sedangkan Y2 sebesar 0.924, karena R^2 lebih besar dari 0.67 (standar) maka dapat dikatakan baik, yang dapat ditarik kesimpulan bahwa konstruk memiliki pengaruh yang substantif.

$$\begin{aligned} Q^2 &= 1-(1-R_1^2)(1-R_2^2) \\ &= 1-(0,209)(0,076) \\ &= 0,98 \end{aligned}$$

Dari hasil Q^2 diperoleh nilai sebesar 0,98 dan dapat disimpulkan bahwa 98 persen kualitas LKPD Kabupaten Tabanan di pengaruhi oleh kompetensi

SDM, penerapan SAP, pemanfaatan SIPKD, melalui mediasi variabel penerapan SPIP, sedangkan sisanya 0,02 atau 2 persen dipengaruhi oleh faktor lain. Semua konstruk berhubungan positif dan *signifikan* dengan probabilitas kurang dari 1 persen. Variabel yang berpengaruh lebih besar terhadap Kualitas LKPD (Y2) di Kabupaten Tabanan adalah Kompetensi SDM (X1) dibandingkan dengan Penerapan SAP (X2), Pemanfaatan SIPKD (X3), dan Penerapan SPIP (Y1), seperti terlihat pada Tabel Pengaruh Langsung Antar Variabel berikut.

Tabel 1.
Pengaruh Langsung Antar Variabel

Hubungan Antar Variabel		Loading	Sterr	T statistik	ρ value	Ket
Kompetensi SDM (X1)	→ Penerapan SPIP (Y1)	0.276	0.069	3.980	0.000	Sig
Kompetensi SDM (X1)	→ Kualitas LKPD (Y2)	0.151	0.062	2.446	0.015	Sig
Penerapan SAP (X2)	→ Penerapan SPIP (Y1)	0.326	0.089	3.650	0.000	Sig
Penerapan SAP (X2)	→ Kualitas LKPD (Y2)	0.308	0.046	6.646	0.000	Sig
Pemanfaatan SIPKD (X3)	→ Penerapan SPIP (Y1)	0.439	0.102	4.307	0.000	Sig
Pemanfaatan SIPKD (X3)	→ Kualitas LKPD (Y2)	0.339	0.087	3.908	0.000	Sig
Penerapan SPIP (Y1)	→ Kualitas LKPD (Y2)	0.299	0.087	3.443	0.001	Sig

Sumber: Hasil Perhitungan PLS

Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas LKPD Kabupaten Tabanan.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan *signifikan* terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan dengan koefisien regresi 0,151. Hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM yang diwakili oleh responden menentukan kualitas LKPD yang dihasilkan yang

akan mempengaruhi pemberian opini oleh BPK-RI. Sebagian besar dari indikator kompetensi SDM (latar belakang pendidikan, pemahaman terhadap peraturan dan standar, pelatihan dan bimtek, serta pengalaman bekerja) memiliki rata-rata skor diatas 4. Ini menandakan bahwa kompetensi SDM untuk dapat meningkatkan kualitas LKPD memiliki tingkat yang tinggi. SDM yang berkompeten akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kekeliruan atau laporan keuangan yang tidak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan merupakan dampak dari kegagalan SDM Pemerintah Daerah terhadap pemahaman dan penerapan logika akuntansi (Warisno, 2008). Hasil Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dibuktikan Ruri Widiastuti (2013) dan Yuliarta (2013) yang membuktikan bahwa kompetensi SDM dibidang akuntansi dan Pejabat Penatausahaan Keuangan memiliki pengaruh yang positif dan nyata terhadap nilai laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian Ayu Darmayani (2014) yang menyatakan kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai laporan keuangan.

Pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan.

Penerapan SAP berpengaruh positif dan *signifikan* terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan dengan melihat koefisien regresi sebesar 0.308. Ini berarti pemahaman dan penerapan SAP dalam pengelolaan keuangan dan dalam penyusunan LKPD menentukan kualitas LKPD Kabupaten Tabanan. Berdasarkan distribusi frekuensi menunjukkan bahwa indikator dari penerapan SAP (akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja) memiliki rata-rata skor di atas 4. Ini menandakan bahwa

penerapan SAP memiliki pengaruh yang positif dan dipercaya mampu meningkatkan kualitas LKPD Kabupaten Tabanan. Sama halnya dengan teori tentang Kualitas LKPD dipengaruhi oleh penerapan sistem akuntansi yang andal (Mardiasmo, 2006). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang disimpulkan oleh Nugraheni (2008) bahwa penerapan SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Penelitian yang dibuktikan oleh Roviyantie (2011) juga sejalan dengan penelitian ini dan menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.

Pengaruh pemanfaatan SIPKD terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan SIPKD memiliki pengaruh positif dan *signifikan* terhadap peningkatan kualitas LKPD Kabupaten Tabanan dengan koefisien regresi 0,339. Ini berarti adanya upaya perbaikan kualitas LKPD melalui pemanfaatan SIPKD. Dengan kata lain kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sangat dibantu oleh sistem informasi yang dimiliki dalam pengelolaan keuangan dan dalam pelaporan/penyusunan laporan keuangan. Ini dibuktikan dari indikator pemanfaatan SIPKD (kemajuan informasi komunikasi, perkembangan web dan teknologi internet, perubahan sistem pelaporan, sarana prasarana yang memadai dan pemeliharaan yang teratur) memiliki skor rata-rata di atas 4. Pemanfaatan SIPKD memiliki peran dalam meningkatkan kualitas LKPD Kabupaten Tabanan karena melalui SIPKD laporan keuangan yang dihasilkan lebih cepat, tepat, dan akurat sehingga laporan

keuangan yang dihasilkan dapat terselesaikan secara tepat waktu. Pembangunan yang terselenggara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menjelaskan sebagai berikut.

“Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good Governance*), Pemerintah Daerah wajib untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah demi terselenggaranya pelayanan publik. (PP No 60 Tahun 2005)”.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yosefrinaldi (2008) yang menyimpulkan tentang pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD, dimana pemanfaatan sistem informasi teknologi informasi yang semakin baik akan berpengaruh terhadap semakin baiknya kualitas LKPD yang dihasilkan. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sangat didukung oleh kuat lemahnya SPIP yang dimiliki dan yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan khususnya dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini juga sejalan oleh penelitian Ari Udiyanti (2014) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD.

Pengaruh penerapan SPIP terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan.

Penerapan SPIP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas LKPD Kabupaten Tabanan dengan koefisien regresi 0,229. Ini berarti adanya upaya perbaikan kualitas LKPD melalui penerapan SPIP. Dengan kata lain kualitas laporan keuangan ditentukan oleh kuat lemahnya SPIP yang dimiliki. Ini dibuktikan dari indikator penerapan SPIP (integritas data,

ketepatan posting dan input data, prosedur otorisasi dokumen transaksi, tersimpannya dokumen sumber data, dan pembagian tanggung jawab) memiliki skor rata-rata di atas 4. Ini menunjukkan bahwa penerapan SPIP mempunyai kontribusi yang besar terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan.

Tabel 2.
Hubungan Tidak Langsung/ *indirect effects* antar variable

Hubungan Antar Variabel				Original sampel	Sterr	T statistik	P value
Kompetensi (X1)	SDM	→	Kualitas LKPD (Y2)	0.082	0.031	2.640	0.009
Penerapan (X2)	SAP	→	Kualitas LKPD (Y2)	0.097	0.036	2.713	0.007
Pemanfaatan (X3)	SIPKD	→	Kualitas LKPD (Y2)	0.131	0.060	2.201	0.028

Sumber : Hasil Perhitungan PLS

Pengaruh tidak langsung Kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP.

Hasil Penelitian pengaruh tidak langsung kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD melalui penerapan SPIP dengan melihat koefisien regresi sebesar 0.082. Ini berarti bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP. Ini membuktikan bahwa SPIP merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas LKPD Kabupaten Tabanan. Kuat lemahnya sistem Pengendalian Intern yang didukung oleh kompetensi SDM menentukan kualitas LKPD yang dihasilkan. SDM pengguna sistem harus memiliki keahlian yang memadai serta mempunyai kemauan terus belajar untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki khususnya dalam bidang akuntansi. Kualitas informasi yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kemampuan SDM itu sendiri.

Pengaruh tidak langsung penerapan SAP terhadap LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan SAP memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP ini terlihat melalui koefisien regresi yang dihasilkan yaitu 0.097. Ini berarti Penerapan SAP dalam penyusunan LKPD Kabupaten Tabanan yang didukung dengan SPIP yang kuat akan dapat meningkatkan kualitas LKPD yang dihasilkan. Sistem akuntansi yang baik adalah sistem akuntansi yang memiliki sistem pengendalian yang baik. Kualitas LKPD sangat dipengaruhi oleh seberapa andal sistem akuntansi yang diterapkan (Mardiasmo, 2006). Laporan Keuangan akan lebih berkualitas dengan berpedoman dengan SAP sehingga dapat dijadikan perbandingan kinerja antar kurun waktu dan dengan Pemerintah Daerah lainnya, bagi auditor dengan adanya SAP akan mempermudah proses audit karena pada dasarnya audit adalah memeriksa laporan keuangan yang merupakan asersi manajemen dikaitkan dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan.

Pengaruh tidak langsung pemanfaatan SIPKD terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan SIPKD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP ini terlihat melalui koefisien regresi yang dihasilkan yaitu 0.131. Ini berarti pemanfaatan SIPKD dalam penyusunan LKPD Kabupaten Tabanan harus didukung dengan SPIP. Kuat atau lemahnya SPIP yang dimiliki akan dapat mempengaruhi kualitas LKPD yang

dihasilkan. Sesuai dengan Teori berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan yang memuat sebagai berikut.

“Laporan keuangan yang berkualitas atau yang memiliki nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang baik, SPIP memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah (Permendagri No 13 Tahun 2006)”.

Hasil Penelitian ini mendukung penelitian yang dinyatakan oleh Yosefrinaldi (2008) menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD. Sistem Pengendalian Internal merupakan salah satu tolak ukur yang harus di gencarkan Pemerintah Daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem pengendalian internal yaitu:

“Menyajikan data yang dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi operasional, mendorong pelaksanaan kebijakan yang ada, melindungi harta milik perusahaan, memeriksa kecermatan dan kehandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, mendorong ditaatinya kebijakan yang telah digariskan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.(PP. No. 60 Tahun 2008)”.

Pengaruh tidak langsung kompetensi SDM, penerapan SAP, pemanfaatan SIPKD terhadap kualitas LKPD melalui penerapan SPIP dilihat dari *indirect effects* antar variabel termasuk hubungan *partial mediasi* dimana secara langsung kompetensi SDM, penerapan SAP, pemanfaatan SIPKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD, demikian juga secara tidak langsung melalui penerapan SPIP menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Adapun simpulan penelitian ini yaitu:

- 1) Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan.
- 2) Penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan.
- 3) Pemanfaatan SIPKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan.
- 4) Penerapan SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan.
- 5) Ada pengaruh tidak langsung kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan yang dimediasi oleh penerapan SPIP.
- 6) Ada Pengaruh tidak langsung penerapan SAP terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan yang dimediasi oleh penerapan SPIP.
- 7) Ada Pengaruh tidak langsung pemanfaatan SIPKD terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan yang dimediasi oleh penerapan SPIP.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka variabel kompetensi SDM (Pengelola Keuangan) di masing-masing SKPD di Pemerintah Kabupaten Tabanan memiliki pengaruh dalam menentukan kualitas LKPD. Dengan demikian, dalam penempatan pegawai hendaknya menyesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki (*The right man on the right place*). Kebutuhan organisasi, juga perlu disesuaikan,

pelatihan dan Bimtek yang berkelanjutan sehingga pemahaman terhadap peraturan dan standar penyusunan laporan keuangan lebih optimal, dan dapat meningkatkan interaksi dengan sistem pengelola keuangan yang ada. Formasi kebutuhan pegawai yang direncanakan dalam perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil, agar lebih banyak mencari SDM yang mempunyai latar belakang pendidikan ekonomi, khususnya akuntansi. Dalam hal penyusunan LKPD, Pemerintah Kabupaten Tabanan harus berpedoman pada SAP untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga dapat memberikan informasi bagi pengguna laporan agar lebih mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan penerapan SAP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dalam upaya meningkatkan kualitas LKPD yang dihasilkan selain kompetensi SDM dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sarana prasarana pendukung baik dari segi kuantitas maupun kualitas juga harus memadai sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi.

REFERENSI

- Ayu Darmayani, 2014 “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Pengendalian Intern terhadap Nilai Laporan keuangan pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng” (*tesis*)
- Ari Udiyanti, 2014 “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah” (studi kasus pada SKPD Kabupaten Buleleng) (*tesis*)
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2014 IHPS I Tahun 2013 *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012*

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2013 *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota di Provinsi Bali tahun 2013*
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2013 *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2013*
- Bastian Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik. Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS.*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Structural Equation Modelin Metode Alternative dengan Partial Least Square*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim Abdul. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Revisi seri bunga rampai Manajemen keuangan Daerah: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Kharis 2010 tentang *kompetensi sumber daya manusia*
- Lillrank, Paul. 2003. "The quality of information", *International Journal of Quality & Reliability Management* Vol. 20 No. 6 pp. 691-703
- Mardiasmo, 2006. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Buku seri membudayakan akuntabilitas publik: Penerbit UPP STIM YKPN
- Nugraheni, 2008 "Pengaruh Penerapan SAP di Inspektorat Jenderal departemen Pendidikan Nasional terhadap Kualitas Laporan Keuangan"
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Thun 2006 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang *Sistem Informasi keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem pengendalian intern Pemerintah*
- Roviyantie, Devi. 2012. "Pengaruh Kompetensi SDM dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah" (survey pada organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya)
- TJiptoherijanto, 2001 dan Alimbudiono & Fidelis, 2004 dalam Celviana dan rahmawati 2010 "Pengaruh SDM dan Pemanfaatan TI terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dengan variable intervening pengendalian Intern akuntansi" (*studi empiris di Pemda Subosukowonosraten*)

Warisno 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi*

Yosefrinaldi, 2011. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas Lapaoran Keuangan Pemerintah Daerah dengan variabel intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (studi empiris pada DPKAD se-Sumatra Barat)*

Yuliarta (2013), *Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang.*